

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 1999, penelitian pada bidang akuntansi menyimpulkan betapa pentingnya teknologi dalam sistem akuntansi, dimana teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan sistem akuntansi untuk beradaptasi lebih baik seperti sistem pengelolaan aliran operasi yang menyampaikan secara otomatis informasi akuntansi yang *real time*, sehingga dapat mencapai keandalan dan relevansi. Salah satu sistem yang berkembang pada saat sekarang ini untuk menjawab semua kebutuhan manajemen adalah Enterprise Resource Planning, yang lebih dikenal dengan sebutan ERP (Ungureanu, 2003).

Dengan adanya sistem ERP yang digunakan oleh pemerintahan maka pelaksanaan *e-Government* akan lebih baik (Litan et al., 2011). Koh et al. (2008) menyatakan bahwa *e-Government* mengalami proses transformasi dari fungsi informasi, transaksi dan operasional yang terpisah menjadi suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh fungsi tersebut pada satu portal. ERP mengintegrasikan seluruh sistem *e-Government*, dimana menurut Wibisono (2005) ERP mengintegrasikan sistem yang tadinya saling berdiri sendiri pada departemen-departemen yang ada. Setiap departemen masih memiliki sistem sendiri, tetapi semua sudah terintegrasi satu sama lain, sehingga dapat memantau suatu permasalahan yang terjadi secara terstruktur.

Bahari (2015) menyatakan bahwa pemerintahan dunia sedang melakukan reformasi besar-besaran terhadap buruknya birokrasi, gerakan tersebut dikenal

dengan nama *new public manajement*, era pasca-birokrasi, manajerialisme atau *reinventing government*. Dan *e-Government* adalah bagian dari gerakan pemerintahan dunia tersebut, dimana Saidi (2002) menyatakan pelaksanaan *e-Government* di kawasan Timur Tengah dan Afrika Selatan menjadi suatu harapan besar dan memiliki nilai yang sangat baik dimasa depan guna mencapai tujuan pemerintahan dalam mencapai *good governance*.

Bagaimana dengan pemerintahan Indonesia? Sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998 hingga saat ini, Indonesia terus berbenah untuk menjadi lebih baik, terutama reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Munculnya isu *good governance* (tata kelola pemerintah yang baik) menuntut pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel yang dipraktekkan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik. Tapi Suaedi (2010) berpendapat bahwa hal tersebut sulit untuk dilakukan karena merupakan fenomena umum bahwa selama ini pemerintahan di negara-negara berkembang memakan biaya tinggi, namun memberikan sedikit pelayanan, dan kurang begitu responsive atau kurang akuntabel. Birokrasi yang ada di Indonesia cenderung bersifat patriomonalistis : tidak efisien, tidak efektif, (*over comsuming and under producing*), tidak objektif, tidak mengabdikan pada kepentingan umum, kurang memposisikan diri sebagai alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen penguasa dan sering tampil sebagai penguasa yang sangat otoritatif dan represif.

Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya telah melakukan berbagai usaha dalam reformasi birokrasi, sama seperti pemerintahan dunia pada umumnya. Dimana Pemerintah Indonesia telah memulainya sejak zaman Presiden Soeharto yang ditandainya dengan berdirinya Badan Koordinasi Otomatisasi Administrasi

Negara (Bakotan) pada tahun 1969 yang memiliki fungsi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi negara melalui penguasaan teknologi informasi, hal tersebut terus berkembang pada masa Presiden Habibie dengan dikeluarkannya Kepres nomor 30 tahun 1997 tentang pembentukan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid diperbaharui kembali dengan Kepres Nomor 50 tahun 2000 yang menunjuk Wakil Presiden sebagai ketua TKTI dengan anggota semua menteri baik yang memimpin departemen ataupun menteri negara.

Reformasi birokrasi dengan teknologi terus berlanjut pada masa Presiden Megawati dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan *e-Government* dan diikuti dengan panduan yang dikeluarkan oleh KEPMENKOMINFO nomor 56 tahun 2003 tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik (Suaedi, 2010). Dan terakhir pada masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dimana pada awal tahun 2006 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan ICT yaitu Keputusan Presiden nomor 20/2006 tentang Pembentukan Dewan Informasi Nasional dan Komunikasi Teknologi yang secara tidak langsung memperkuat kebijakan dalam pengembangan *e-Government*. Keputusan ini diamanatkan untuk merumuskan kebijakan publik dan arah strategis pembangunan nasional, melalui penggunaan ICT (Detiknas, 2010).

Lebih lanjut, pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pengembangan *e-Government* ditetapkan sebagai program prioritas dalam rencana pembangunannya, khususnya untuk mencapai misi mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional seperti yang tertuang dalam

Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010 - 2015. Penggunaan *e-Government* merupakan salah satu gerakan terpadu reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan sasaran meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Pariaman telah merencanakan *e-Government* dalam Perda Nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013 s/d 2018, dimana tertuang pada upaya pencapaian visi pembangunan Kota Pariaman menjadi kota tujuan wisata dan ekonomi kreatif berbasis lingkungan, budaya dan agama. Upaya tersebut dirumuskan kedalam misi Kota Pariaman yang terdiri dari 4 (empat) target, salah satunya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri, yang memiliki beberapa tujuan, dengan salah satu tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pemantapan reformasi birokrasi yang memiliki dua sasaran yaitu : (a). Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Daerah, (b) Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah berbasis web dan secara online (*e-Government*).

Menurut Syerlina selaku Kasi Sarana Deseminasi Komunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman dalam wawancara yang penulis lakukan tanggal 3 September 2015 perihal RPJMD yang berkaitan dengan pengembangan *e-Government*, beliau menyatakan bahwa :

“...Kota Pariaman pada tahun 2015 telah melakukan kerjasama dengan Telkom selama lima tahun kedepan untuk mewujudkan *smart city*, pada tahun ini telah dilakukan pembangunan infrastruktur tahap pertama. Ada tiga hal pokok dalam perencanaan pembangunan *smart city* Kota Pariaman yaitu human capital, aplikasi dan suprastruktur (aturan) yang akan dilakukan secara bertahap...”

Selain itu, berdasarkan observasi penulis dilapangan, ditemukan bahwa Pemerintah Kota Pariaman telah memiliki beberapa aplikasi dalam membantu pengelolaan keuangan maupun pelayanan masyarakat, seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan dan barang milik daerah. Namun selaku pengguna sistem informasi pada SKPD, penulis masih melakukan proses manual yang seharusnya dapat dihilangkan saat penggunaan sistem. Misalnya saat penulis melakukan input data pengadaan belanja modal pada SIMDA keuangan, penulis harus melakukan input data lagi pada SIMDA barang milik daerah dengan data yang sama. Lain halnya dengan Pemerintahan Kota Surabaya. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam *one hour university* Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral (2015) mengatakan :

“... berikutnya adalah SIMBADA, ini adalah sistem barang milik daerah. Jadi kalo sudah pengadaan, maka kemudian masuk ke sistem barang milik daerah kita secara otomatis. Jadi *kalo* akuntansi itukan kemudian dikumpulkan untuk barang aset daerah. Nah, ini *enggak*. Ini secara otomatis. Jadi *kalo* belanja modal itu secara otomatis masuk ke sistem barang daerah kami, jadi tidak mendata lagi...”

Namun permasalahannya pengadopsian sistem ERP pada sektor publik memiliki sejarah yang cukup buruk. Beal dan Prabhakar (2014) dalam tulisannya tentang *public sector* ERP mengemukakan bahwa pemerintahan menganggap proyek ERP identik dengan kesan yang negatif, dimana kenyataannya memang pada beberapa kasus terjadi kegagalan. Contohnya adalah pengimplementasian ERP di *King County*, Washington. Banyak cerita seperti biaya dan jadwal yang

overruns, masalah penggajian, dan masalah pelaporan keuangan yang berkemungkinan memberikan kontribusi terhadap pergeseran fokus pasar untuk mewujudkan pengembalian manfaat investasi dalam investasi ERP.

Sejalan dengan Beal, Nasir dan Sahibuddin (2011) menemukan bahwa sebanyak 72,43% (tujuh puluh dua koma empat puluh tiga persen) proyek yang berhubungan dengan sistem dari tahun 1994 s/d 2008 bermasalah. Oleh karena itu Nasir dan Sahibuddin menekankan bahwa perlu dilakukannya penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya proyek implementasi sistem.

Dari permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa butuh suatu analisa kesiapan dalam mengimplementasikan suatu sistem baru, khususnya pada organisasi sektor publik. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Kota Pariaman dalam implementasi sistem ERP yang mendukung *e-Government* sebagaimana yang diamanatkan oleh Intruksi Presiden Nomor 3/2003. Penelitian ini akan mencoba melakukan analisis kesiapan Pemerintah Kota Pariaman dalam menerapkan sistem ERP.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas penulis merumuskan masalah “bagaimanakah kesiapan Pemerintah Kota Pariaman dalam implementasi sistem ERP?”

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Kota Pariaman dalam implementasi sistem ERP.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian dapat bermanfaat, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Pariaman dapat dijadikan masukan dalam perencanaan pelaksanaan *e-Government* demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) khususnya sistem informasi terintegrasi.
3. Bagi penelitian berikutnya, semoga dapat menjadi referensi dalam perencanaan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini terbatas pada studi tentang kesiapan Pemerintah Kota Pariaman dalam implementasi sistem ERP. Adapun faktor-faktor kesiapan yang diteliti adalah kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, kesiapan tingkat adopsi sistem ERP, kesiapan sumber daya manusia, dan budaya organisasi yang ada pada Pemerintah Kota Pariaman.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- I. **BAB I Pendahuluan**, memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.
- II. **BAB II Tinjauan Pustaka**, menguraikan tentang landasan teori, tinjauan literatur, model analisis, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir penelitian.
- III. **BAB III Metodologi Penelitian**, menguraikan desain penelitian, variabel penelitian dan alat pengukuran, populasi dan sampel, data dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- IV. **BAB IV Pembahasan**, menguraikan tentang hasil penelitian, hasil uji validitas dan reabilitas, hasil analisis data dokumentasi, statistik deskriptif dan wawancara serta pembahasannya.
- V. **BAB V Kesimpulan Dan Saran**, memuat kesimpulan dan saran penelitian.

